BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Tempat Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo merupakan Lembaga Pemasyarakatan di bawah Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Memiliki fungsi dan tugas untuk menampung, merawat dan membina Anak Didik Pemasyarakatan dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY, disamping juga sebagai Rumah Tahanan Anak Purworejo. Letak geografis Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo di Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, tepatnya di Jalan P. Diponegoro No. 36 A. Mempunyai Luas Tanah: 6.843 m², Luas Bangunan: 1.289 m².

a. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo

Tahun 1880, gedung Lembaga Pemasyarakatan Anak didirikan/ dibangun oleh Pemerintah Belanda. Tahun 1917, gedung digunakan sebagai Rumah Tahanan Perang. Tahun 1945, menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia dalam keadaan kosong hingga Tahun 1948. Tahun 1948, sebagai Tangsi Tentara Indonesia, dalam tahun ini juga dikembalikan kepada Jawatan Kepenjaraan untuk digunakan sebagai Rumah Penjara sampai Tahun 1960. Tahun 1962 sampai Tahun 1964, sebagai Rumah Penjara Jompo.

Tahun 1964 berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 8 Juni 1979

Nomor: JS.4/5/16 Tahun 1979 tentang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara di Kutoarjo (LP AN). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 5 Pebruari 1991, Nomor: M.01.PR.07.03 tentang pemindahan tempat kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Jawa Tengah dari Ambarawa ke Kutoarjo dan penghapusan cabang Rutan Purworejo di Kutoarjo.

Pada Tahun 1993 baru berfungsi penuh sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoarjo hingga sekarang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 16 Desember 1983 Nomor: M.03-UM.01.06, tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan, dalam hal ini LP AN Kutoarjo beralih status menjadi cabang Rumah Tahanan Purworejo di Kutoarjo.

b. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kutoarjo adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri).

Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kutoarjo adalah melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sementara tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kutoarjo meliputi;

1) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2) Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan, narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka memperlancar proses pembinaan dan pembimbingan .

c. Keadaan Fisik

1) Satu komplek bangunan terdiri dari :
   a) Satu gedung bertingkat dua digunakan untuk perkantoran.
   b) Satu gedung bertingkat dua dipergunakan sebagai ruang serbaguna antara lain untuk Mushola, ruang pertemuan dan olahraga, ruang kunjungan (besuk), dan ruang perawatan kesehatan.
   c) Tiga gedung untuk tempat hunian Anak Didik Pemasyarakatan, terdiri dari Blok A, Blok B, dan Blok C.
   d) Satu komplek bangunan yang terdiri dari :
      (1) Satu ruang Perpustakaan
      (2) Tiga ruang Pendidikan
      (3) Dua ruang Kegiatan Kerja Serta halaman kosong digunakan untuk kegiatan berkebun dan pertanian

2) Satu komplek bangunan di luar Lapas terdiri:

a) Satu unit Rumah Dinas Kepala

b) Tujuh unit Rumah untuk Pejabat Struktural

c) Satu unit Garasi

d. Sasaran Pembinaan dan Pembimbingan

1) Sasaran pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu :

a) Kualitas Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

b) Kualitas Intelektual

c) Kualitas Sikap dan Perilaku

d) Kualitas Profesionalisme/ keterampilan

e) Kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani

2) Sasaran pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya juga merupakan situasi/kondisi yang memungkinkan bagi terwujudnya Tujuan Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Nasional, sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur hasil yang dicapai dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, yaitu:

a) Isi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo lebih rendah daripada kapasitasnya.

b) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka gangguan keamanan dan ketertiban .

c) Menurunnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses Asimilasi dan Integrasi.

d) Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis

e) Semakin menurunnya jenis-jenis kejahatan sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/ golongan Narapidana .

f) Biaya perawatan Tahanan, Narapidana, Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan kebutuhan biaya minimal manusia pada umumnya .

g) Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara .

h) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat kedalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub-kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan

e. Program Strategis Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut, maka ditetapkan 10 (sepuluh) program strategis yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

1) Pengendalian Isi Lembaga Pemasyarakatan.

2) Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

3) Peningkatan kegiatan Asimilasi dan Integrasi .
4) Penurunan angka residivis .
5) Peningkatan sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan.
6) Peningkatan jumlah tenaga kerja narapidana yang diserap dalam kegiatan kerja produktif.
7) Peningkatan pelayanan kesehatan dan perawatan narapidana dan Tahanan.
8) Peningkatan upaya perawatan kesehatan, kebersihan dan pemeliharaan Lembaga Pemasyarakatan.
9) Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembinaan dan pembimbingan.
10) Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan Petugas Pemasyarakatan.

2. Implementasi Program Pendidikan Nonformal untuk Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Kelas II A Kutoarjo.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo ini merupakan satu-satunya Lapas Anak yang berada di wilayah Jawa Tengah dan DIY yang dikelola oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (RI). Penghuni Lapas ini hanya berasal dari wilayah provinsi Jawa Tengah dan DIY saja. Lapas Anak ini terpisahkan dengan Lapas dewasa, karena dengan berbagai pertimbangan seperti pertimbangan moril dan lingkungan, dan sejatinya penanganan mereka juga berbeda.

Kapasitas di Lapas Anak Kutoarjo adalah 116 orang namun biasanya terisi oleh napi sebanyak 90 sampai 100 orang bahkan pernah terisi sampai 120 orang. Maraknya tingkat kriminalitas pada anak-anak mengakibatkan Lapas ini terisi melebihi kapasitasnya. Jumlah narapidana sini tidak pasti, karena kemungkinan setiap hari harinya ada narapidana yang keluar dan yang masuk. Narapidana disini terdiri dari berbagai kasus, berikut ini disajikan datanya:

Tabel 3. Jenis kasus dan jumlah anak Lapas Anak Kutoarjo Per 25 April 2013

No.	Kasus	Jumlah
1.	Ketertiban	6 orang
2.	Kesusilaan	8 orang
3.	Kelalaian	4 orang
4.	Pencabulan	55 orang
5.	Pembunuhan	5 orang
6.	Penganiayaan	-
7.	Pencurian	16 orang
8.	Perampokan	2 orang
9.	Penipuan	3 orang
10.	Narkotika	5 orang
11.	Pemerasan	1 orang
12.	Lalu Lintas	1 orang
Jumlah		106

Sumber: Laporan bulanan Lapas Anak Kutoarjo (per 25 April 2013)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui latar belakang dari narapidana penghuni Lapas. Mereka berasal dari kawasan Jawa Tengah dan DIY, yang menjalankan hukuman mulai dari 3 bulan sampai usia 18 tahun lebih tergantung kasusnya. Selama mereka di Lapas banyak kegiatan yang bisa dilakukan, terutama yang bekaitan dengan pendidikan nonformal.

Tabel 4. Jumlah narapidana berdasarkan golongan pidana (per 25 April 2013)

No.	Jenis Golongan	Jumlah (orang)
1.	B 1	59
2.	B IIa	6
3.	B IIb	-
4.	B III	3
5.	Anak Negara	25
6.	Tahanan	2
Jumlah		106

Sumber: Laporan bulanan Lapas Anak Kutoarjo (per 25 April)

Berbeda dengan Lapas dewasa yang mementingkan keterampilan yang berorientasi keuntungan untuk kegiatan pembinaanya, Lapas anak lebih menekankan pada pendidikan. Disebabkan narapidana di sini masih dalam usia sekolah/di bawah usia 18 tahun. Pada rentang usia seperti itu pendidikan menjadi sangat penting. Namun di Lapas Anak terdapat narapidana yang berusia 19 tahun, ini karena ada pertimbangan khusus antara lain karena anak tersebut belum menyelesaikan kejar paket, atau karena menunggu kebebasan yang tidak lama lagi. Tetapi menurut

aturannya 18 lebih 1 hari harus dipindahkan ke Lapas dewasa, kecuali dengan pertimbangan sebelumnya. Berikut ini akan disajikan data usia narapidana Lapas Anak Kelas II A Kutoarjo:

Tabel 5. Jumlah anak berdasarkan umur (L/P)

No.	Kategori	Jumlah
1.	Umur 12-15 Tahun	61 orang
2.	Umur 16-18 Tahun	45 orang
Jumlah		106 orang

Sumber: laporan bulanan Lapas (per 25 April 2013)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Bambang dalam wawancara (01 April 2013) yang menyatakan:

> Usia 19 tahun dikarenakan waktu ditahan yang bersangkutan sudah berumur 17 atau 16 lalu mengikuti sekolah kesetaraan di PKBM "Tunas Mekar" dan belum lulus, jika dipindahkan ke Lapas dewasa nanti napinya nanggung dan mereka tidak bersekolah lagi. Kebijakan ini hanya untuk anak anak tertentu, aturan yang benar adalah 18 tahun lebih 1 hari harus keluar. Jika kurang beberapa bulan masa tahan mereka juga tidak dipindahkan dengan pertimbangan perilaku.

Narapidana yang masuk Lapas ini berasal dari wilayah Jawa Tengah dan DIY, mayoritas dari mereka masih masuk usia sekolah. Oleh karena itu, ini menjadi dasar pelayanan yang utama dari Lapas Anak Kutoarjo, sehingga kebutuhan dan hak narapidana sebagai warga negara dapat terpenuhi secara baik, meskipun mereka sedang menyandang status tahanan. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran di Lapas Anak berbagai jenis kegiatan juga tersedia, antara lain: kegiatan menjahit, membuat sandal batik, pertanian, perkebunan, perikanan, karawitan, musik disamping kejar paket

yang menjadi kegiatan utama. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Samiaji yang menjelaskan bahwa “Kegiatan kerja meliputi peternakan, perikanan, kerajinan sandal dan tumpal, perkebunan, pertanian, karawitan dan musik”.

Kegiatan pendidikan nonformal yang ada di Lapas ini terdiri dari berbagai macam jenis antara lain kejar paket, menjahit, membuat sandal, beternak, pertanian, musik dan karawitan. Keseluruhan kegiatan itu dilakukan di dalam satu kompleks Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Kutoarjo. Hal tersebut terjadi karena para narapidana tidak boleh keluar dari lingkungan Lapas sehingga semua kegiatan dipusatkan di dalam Lapas termasuk untuk keberadaan PKBM “Tunas Mekar”.

PKBM “Tunas Mekar” mendapatkan ijin berdiri karena alasan tersebut. Sebelum PKBM “Tunas Mekar” berdiri, Lapas bekerja sama dengan PKBM “Sawunggalih” yang berada disebelah barat kompleks Lapas untuk pelaksanaan kejar paket. Namun, karena kurang efektif maka lapas berinisiatif mendirikan PKBM “Tunas Mekar” untuk memenuhi kebutuhan anak Lapas. PKBM “Tunas Mekar” berdiri pada tahun 2010 yang lalu dan berbadan hukum atas Akta notaris Willibrordus Sukrisno, SH nomor 01 tanggal 01 Februari 2011. Seperti hasil wawancara (01 April 2013) Bapak Bambang berikut:

> Sebelumnya Lapas mencari PKBM untuk membantu kegiatan pembalajaran kejar paket untuk narapidana Lapas, pengajar PKBM lain datang ke Lapas langsung setiap pembelajaran bukan narapidananya yang datang ke PKBMnya. Setiap kecamatan aturannya ada 1 PKBM namun, untuk Kec. Kutoarjo ada 2, PKBM “Sawunggalih” dan “Tunas Mekar” yang satu berada di Lapas anak Kutoarjo.

Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang di atas mempunyai tujuan untuk untuk mengembangkan diri narapidana agar lebih mandiri terutama setelah keluar dari Lapas. Pernyataan ini dikemukakan Bapak Samiaji dalam wawancara (01 April 2013) yaitu:

> Kegiatannya kerja seperti dalam pendidikan, Lembaga Pemasyarakatan Anak mengutamakan pendidikan, selain kegiatan pendidikan di PKBM yang berupa kejar paket kegiatan yang lain juga ada, yang berupa kegiatan kerja yang lebih bertujuan untuk pengembangan diri untuk narapidana di Lapas ini.

Untuk kegiatan pendidikan di Lapas Anak sudah terjadwal dengan baik. Terbukti ada jadwal kegiatan yang di keluarkan pihak Lapas Anak dan PKBM " Tunas Mekar" yang terjadwal secara baik. Untuk kegiatan kejar paket hanya berlangsung pada hari Senin-Kamis pada jam 09.00-11.00 WIB. Selain itu pelaksanaan kegiatan juga hanya berlangsung pagi hari saja, untuk semua kegiatan. Namun pada hari Jumat dan Sabtu juga ada kegiatan tersendiri, tanpa bimbingan belajar hanya kegiatan kesenian dan keterampilan sementara hari minggu kegiatan diliburkan.

Sarana untuk kegiatan pendidikan juga sudah tersedia dengan baik, seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang kesenian, ruang keterampilan, ruang menjahit, mushola, lapangan, kebun, kolam ikan dan kandang untuk peternakan.

Tabel 6. Daftar sarana untuk kegiatan pendidikan nonformal di Lapas Anak Kutoarjo

No.	Fasilitas	Unit
1.	Ruang Kelas	5 unit
2.	Perpustakaan	I unit
3.	Ruang Menjahit	1 unit
4.	Ruang Ketrampilan	1 unit
5.	Ruang Kesenian	1 unit
6.	Aula	1 unit
7.	Musholah	1 Buah
8.	Lahan Perkebunan	2 tempat
9.	Lahan Pertanian	1 tempat
10.	Kolam Ikan	2 Buah
11.	Kandang	1 Unit

Sumber: Lapas yang diolah peneliti

Selain sarana penunjang kegiatan pendidikan nonformal di Lapas Anak Kelas II A Kutoarjo, prasarana untuk penunjang kegiatan juga tersedia. Antara lain akan di sajikan dalam data sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah prasaranya meliputi penunjang kegiatan pendidikan di Lapas Anak Kutoarjo

Fasilitas Khursus/Ketrampilan	Jumlah
Kursi	80 buah
Meja	40 buah
Papan tulis	4 buah
Alat Musik Gamelan	1 set
Alat Musik Modern	1 set
Mesin Jahit	5 unit
Komputer	3 unit
Mesin Sandal	5 unit
Peralatan berkebun	1 set
Peralatan Berternak	1 set

Sumber: PKBM "Tunas Mekar"

Masih banyak ditemui kekurangannya seperti ruangan yang disekat yang membuat kurang nyaman, peralatan yang kurang jumlahnya. Dalam penyelengaraan sarana dan prasarana ini Lapas juga membantu penyediaan tempat pembelajaran untuk PKBM sendiri. Jadi dalam implementasinya PKBM dan Lapas saling melengkapi kekurangan dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Dalam pelaksanaan pendidikan nonformal maka sangat dibutuhkan sumber daya yang mempunyai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Untuk sumber daya manusia maka diperlukan tenaga pengajar dan tenaga pengawas untuk melancarkan kegiatan pendidikan

nonformal di Lapas. Jumlah pengajar di Lapas anak berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 10 pengajar keterampilan dan 9 pengajar bimbingan belajar. Keseluruhan pengajar tersebut merupakan pegawai tetap, untuk beberapa pengajar ada yang didatangkan dari luar dan ada yang dari pegawai Lapasnya. Tentunya pegawai Lapas yang mempunyai keahlian dan mereka memenuhi dan mampu untuk menjadi pengajar.

Pegawai Lapas juga ada yang menjadi pengajar kejar paket dan ada juga yang mengajar keterampilan maupun kesenian untuk narapidana. Sehingga tidak semua pengajar berasal dari luar Lapas semua. Kekurangan sumber daya finansial yang menyebabkan pengajar dari luar tidak terlalu banyak, karena tidak memungkinkan dana yang tersedia tidak mencukupi. Namun, pegawai Lapas yang menjadi pengajar untuk kegiatan pendidikan nonformal juga dipilih yang terbaik dan memiliki kemampuan, tidak sembarangan. Berikut ini data jumlah pegawai Lapas dan Pengajar:

Tabel 8. Jumlah pegawai Lapas dan PKBM (per 01 April 2013) :

No.	Status	Jumlah
1.	Pengajar bimbingan belajar	9 orang
2.	Pengajar keterampilan	10 orang
3.	Pegawai Lapas	55 orang

Sumber: Laporan bulanan Lapas (per 01 April 2013)

Sedangkan kelompok sasarannya yaitu anak-anak Lapas, jumlahnya 106 (per 25 April 2013) mereka tidak semuanya ikut semua kegiatan belajar di PKBM “Tunas Mekar”. Hal tersebut dikarenakan mereka sudah lulus

kesetaraan tinggal menunggu bebas atau mereka belum terdaftar sebagai siswa karena menjadi penghuni baru di Lapas. Untuk penghuni baru yang belum terdaftar sebagai siswa akan dimasukkan pada tahun ajaran berikutnya. Anak yang ikut PKBM juga belum tentu anak Lapas yang masih ditahan, ada juga yang mantan narapidana dan masih mengikuti pembelajaran karena tinggal menunggu Ujian Nasional (UN) serta mereka sudah terdaftar sebagai peserta UN di Lapas Anak Kelas II A Kutoarjo. Berikut ini data jumlah peserta kejar paket PKBM "Tunas Mekar":

Tabel 9. Data siswa PKBM "Tunas Mekar"Tahun Ajaran 2012/2013

No.	Jenjang	Jumlah
1.	Paket A	7
2.	Paket B 1	11
3.	Paket B 2	23
4.	Paket C 1	17
5.	Paket C3	32
Jumlah		90

Sumber: PKBM "Tunas Mekar"

Karena kesetaraan dikelola PKBM "Tunas Mekar" maka dalam penerimaan murid juga ada dari luar namun jumlahnya sedikit, dalam kesetaraan yang jumlahnya 90 siswa yang terbagi menjadi 5 kelas hanya ditangani oleh 9 pengajar.

Untuk ketersediaan tenaga pengajar maka lapas berupaya mencari sendiri tenaga pengajar tersebut, seperti yang diungkapkan Ibu Umi pada saat wawancara (28 Maret 2013):

> Pengajarnya berasal dari Lapas dan PKBM sendiri yang menyediakan, mereka mendaftar untuk menjadi pengajar disini. Kalo tidak kerja sama dengan PKBM lain, untuk dimintai pengajar jika ada yang mempunyai waktu luang maka diminta untuk mengajar disini. Jadi dinas tidak ikut campur dalam penentuan pengajar PKBM ini, sama seperti di PKBM lain di luar Lapas.

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh salah Ibu Esti selaku pengajar (27 Maret 2013):

> Pengajar PKBM bukan utusan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo, namun dari mendaftar di Lapas sendiri. Karena aturannya PKBM itu mengelola sendiri untuk pengajarnya, disini saya juga mengajar di sekolah lain. Namun, Lapas tetap laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan Kab Purworejo.

Kegiatan belajar di PKBM "Tunas Mekar" hanya berlangsung selama 4 (empat) hari yaitu Senin-Kamis pada pukul 09.00-11.00 WIB. Tidak semua pengajar dalam satu hari datang semua, hal ini dikarenakan mereka tidak ada jam mengajar atau mereka mengajar ditempat lain.

Kegiatan kesenian dan keterampilan yang disediakan di Lapas Anak beraneka ragam jenisnya mulai dari karawitan, berkebun, pertanian, perikanan, peternakan, menjahit, musik dan membuat sandal. Semua itu dibimbing oleh pengajar. Pengajarnya kebanyakan dari pihak Lapas, walaupun ada yang dari luar. Pengajar dari luar disebabkan di Lapas tidak ada tenaga ahlinya. Jumlah pengajar kegiatan ini ada 10 orang yang mengampu masing masing kegiatan kerja. Dalam pelaksanaan kegiatan para tenaga pengajar ini memiliki peran masing-masing, dan pada jadwal masing-masing. Semua pengajar ini dikelola oleh pihak Lapas.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, untuk masalah pengajar keterampilan dan keseniaan tidak mengalami kendala yang berarti karena

semua pegawai Lapas bisa menangani jika pengajarnya berhalangan hadir. Hal tersebut disebabkan pengajarnya kebanyakan berasal dari dalam, berbeda dengan kegiatan belajar yang pengajarnya sebagian besar dari luar, sehingga kegiatan bisa tetap berjalan meski tanpa pengajar.

Sumber daya finansial yang diperoleh untuk keberlangsungan pendidikan nonformal berasal dari Lapas dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo. Dana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo tidak setiap tahun ada, dan dana dari Lapas juga tidak pasti dan besar. Berikut ini akan disajikan dana untuk pendidikan nonformal di Lapas Anak Kelas II A Kutoarjo:

Tabel 10. Dana yang diterima untuk kegiatan pendidikan nonformal

No.	Dari lapas	Dari Dinas P&K
1.	Tidak tentu	Paket A : 12,5 juta
2.	Tidak tentu	Paket B : 45 juta

Sumber : Hasil wawancara

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Sri Lestari dalam wawancara (01 April 2013):

> Dana ada yang dari Lapas sendiri, jumlahya tidak pasti karena sudah untuk keperluan yang lain seperti makan sehari-hari dan kesehatan. Untuk dana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu bervariasi, untuk kesetaraan paket A berjumlah 12,5 juta dan untuk paket B berjumlah 45 juta. Itu tidak setiap tahun dapat semua. Untuk paket C belum pernah dapat.

Pendapat Ibu Sri Lestari di perkuat dengan pendapat Ibu Umi (28 Maret 2013), yaitu :

> Untuk mendapatkan dana perpaket caranya berbeda untuk pengajuan dan setiap tahun nominalnya juga beda. Untuk kejar paket A dan paket B sering dapat dana sedangkan paket C jarang dapat dana. Untuk nominalnya tidak usah disebutkan ya mas. Dana-dana tersebut digunakan untuk beli buku, peralatan sekolah, membayar pengajar. Dana tersebut diberikan dalam 1 semester.

Hal tersebut terjadi dikarenakan dana yang turun dari pemerintah itu dibagi-bagi ke dalam PKBM yang ada di seluruh kabupaten, sehingga dana yang diberikan bukan per PKBM tetapi per Kabupaten. Keterangan tersebut, diperkuat oleh keterangan Ibu Gita Yuristiana S.Sos selaku Kasi PAUD dan Kesetaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo dalam wawancara (16 April 2013):

> Anggaran tergantung dengan kuota yang diberikan oleh atas, ini tidak hanya berlaku di PKBM yang ada di dalam Lapas namun di luar PKBM juga tidak tiap tahun mendapatkan. Pemerintah memberikan dana pada setiap kabupaten berdasarkan kuota lalu dibagi-bagi. Dana yang turun dan kemudian di salurkan ke PKBM itu digunakan di untuk bahan, alat, pembayaran pengajar.

Tidak adanya pemasukan dari pendaftaran, juga menjadikan penyelenggaraan pendidikan nonformal di Lapas semakin minim dana. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Umi dalam wawancara (28 Maret 2013), sebagai berikut:

> Siswa-siswi PKBM sini otomatis anak-anak Lapas, maka tidak ada uang pendaftaran untuk masuk ke PKBM “Tunas Mekar” ini sehingga tidak dapat pemasukan dari pendaftaran. Berbeda dengan PKBM di luar Lapas yang masih bisa mendaftarkan pemasukan dari pendaptaran. Padahal mereka juga harus mempunyai buku, seragam dll.

Selain itu peran pegawai Lapas yang juga penting adalah mengawal narapidana yang mau ke ruang kelas atau yang mau kembali ke sel tahanan, sebab tanpa pengawalan mereka akan kabur dan ini semua tidak mungkin

dilakukan pengajar yang jumlahnya hanya sedikit. Kerjasama yang demikian sangat tergambar jelas dalam pelaksanaan pendidikan nonformal di dalam Lapas Anak. Selain dengan PKBM Lapas juga bekerja sama dengan instansi lain.

Untuk struktur organisasi dari Lapas maupun PKBM itu berbeda, PKBM "Tunas Mekar" di bawah pelindung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo, selain itu pegawai Lapas terlibat dalam kepengurusan PKBM "Tunas Mekar". Hal ini terjadi karena Lapas ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di PKBM dan kegiatan di lakukan di lingkungan Lapas, sehingga Lapas harus mengetahui dan ikut menentukan segala kegiatan. Pihak Lapas masuk struktur pengelolaan PKBM"Tunas Mekar"

Struktur dari Lapas ada tersendiri, namun disini Lapas juga mempunyai perannya dalam PKBM terbukti ada orang Lapas yang masuk kedalam pengurus PKBM. Keikutsertaan pegawai Lapas dalam kepengurusan dikarenakan PKBM ini berada di dalam Lapas sehingga ada keterkaitannya dengan Lapas, dan agar mudah di atur jika ada sesuatu hal.

Kerja sama yang dilakukan oleh Lapas dengan instansi lain ada berbagai macam antara lain; Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, Departemen Agama Purworejo, Kepolisian Resort Purworejo, Dinas Sosial Kabupaten Purworejo, Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo. Dari semua itu ada

macam-macam. Departemen Agama juga mengadakan kegiatan rutin, seperti yang diungkapkan Ibu Legini dalam wawancara (09 April 2013):

> Setiap hari Rabu jam 08.00 dari Departemen Agama Purworejo ada ceramah yang diikuti oleh narapidana mas, walaupun hanya 1 jam. Biasanya ceramahnya diisi oleh Bapak Sukur atau Ibu Siti. Selain itu setiap jum'at ada salah satu pegawai dari Departemen Agama yang jadi imam sholat Jumat di Lapas, karena kami menyelenggarakan sholat Jumat sendiri dengan alasan narapidana tidak bisa keluar dari Lapas.

Kalau kerjasama dengan Dinas Sosial seperti keterangan yang dikutip dari Bapak Bambang (01 April 2013) sebagai berikut:

> Lapas memberi tahu ke Dinas Sosial untuk laporan mengenai anak yang sudah keluar, laporannya setiap bulan. Sebab kalau narapidana sudah habis masa tahanannya bukan menjadi kewenangan Lapas lagi. Itu terserah dengan orang tuanya masing-masing anaknya mau diarahkan kemana. Karena mereka sudah bebas, Lapas hanya memfasilitasi pendidikan.

Pendapat serupa juga disampaikan Ibu Gita Yuristiana S.Sos dalam wawancara (16 April 2013) sebagai berikut:

> Di dalam Lapas ada PKBM yang memberikan pendidikan kesetaraan kepada napi, disini peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Purworejo memberikan pendidikan yang seperti hak yang sama dengan masyarakat yang tidak berkasus dengan hukum. Dinas memberikan kejar paket A,B,C melalui pengelolahan dari PKBM "Tunas Mekar" yang ada di Lapas.

Pendapat Ibu Gita juga dibenarkan oleh Bapak Sugiyono yang merupakan pegawai Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Purworejo, dalam wawancara (16 April 2013) sebagai berikut:

> Peran Dinas dalam pendidikan untuk anak Lapas hanya dalam kesetaraan, karena Lapas juga berkerjasama dengan lintas SKPD lainnya maka bekerjasama dengan banyak Dinas lain seperti pariwisata, disnakertrans, temasuk dana yang dikucurkan tergantung pada kerjasama dengan dinas mana. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memberi ijin berdirinya PKBM "Tunas Mekar" yang ada di Lapas. Ijinnya baru 2

> tahunan, sebenarnya bisa dengan PKBM "Sawunggalih. Karena anaknya tidak boleh keluar maka di buat PKBM di dalam Lapas.

Selain kerjasama dengan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Purworejo, Lapas juga menjalin kerja sama dengan Disnakertrans Kab. Purworejo. Kerjasama ini sudah terjalin lama namun kurang maksimal, karena dalam profil Lapas juga dicantumkan kerjasama dengan Dinas ini namun, menurut Dinasnya kerjasama kurang intensif. Kerjasama hanya pada pelatihan kerja tanpa ada kerjasama untuk penyaluran kerja, kerjasama untuk pelatihan juga jarang dilakukan. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Ibu Ningrum selaku Tata Laksana Disnakertrans pada wawancara (17 April 2013), berikut ini:

> Kerjasama selama ini tidak ada, hanya pelatihan ke Lapas Anak. Untuk mengadakan pelatihan pihak Lapas Anak memberi proposal kepada Disnakertrans untuk mengajukan pelatihan, karena pelatihan yang dilakukan tidak hanya untuk Lapas tetapi banyak ke kelompok masyarakat lainnya sehingga perlu adanya proposal. Mereka tidak ada kerjasama dalam hal penyaluran tenaga kerja, tujuan kerjasama ini untuk pemberdayaan setelah mereka agar setelah keluar dari lapas mampu menjadi masyarakat yang mandiri diingkungan asalnya.Dana yang di gunakan untuk pelatihan berasal dari dana APBD Kab. Purworejo.

Banyak hambatan yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan di lapangan, mulai dari keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu pembelajaran dan perilaku narapidana yang kurang mendukung kegiatan. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk pelaksanaan pendidikan nonformal di Lapas itu sangat minim, ditambah dana dari Dinas Pendidikan yang tidak setiap tahun keluar. Lalu dana dari Lapas juga terbatas, karena dana tersebut sudah terkurangi untuk anggaran sehari hari seperti anggaran makan narapidana dan anggaran kesehatan.

Keterbatasan jam belajar dan jam kegiatan menjadi kendala dalam implementasi pendidikan nonformal yang baik, karena kegiatan tersebut hanya berlangsusng pada pagi hari saja. Kegiatan belajar mengajar hanya berlangsung dari pukul 09.00 sampai pukul 11.00 dan hanya untuk satu mata pelajaran perhari. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari kejenuhan narapidana dalam belajar, sebab nanti akan berdampak buruk pada siswa yang berupa kemalasan dalam belajar, sehingga keputusannya jam belajar tidak dibuat banyak.

Latar belakang narapidana yang mayoritas memiliki perilaku yang kurang baik, di dalam Lapas perilaku tersebut masih terbawa. Bahkan dalam pembelajaran masih sering terlihat perilaku yang kurang sopan, sehingga menghambat proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Rasa malas mereka untuk mengikuti kegiatan belajar maupun keterampilan yang disediakan pihak Lapas masih tinggi, sehingga mereka kurang maksimal dalam mengikuti pembelajaran.

Seperti pendapat Ibu Umi yang memaparkan hambatannya selaku pengajar dalam memberikan pembelajaran kepada narapidana, saat wawancara (28 Maret 2013) :

> Hambatan karena mereka anak yang lain daripada yang lain, mereka anak bermasalah kita mengikuti apa maunya tetapi tidak melenceng ke yang lain. Mencoba mendalami mereka, karena mereka dihalusi tidak bisa dan juga dikasari tidak bisa, agar mereka tetap mau sekolah. Jadi jika mereka jenuh diselingi dengan hiburan yang lain. Kalau diformal fokus sekali tetapi disini lebih sedikit santai.

Pendapat lain dituturkan oleh pengajar yang lain, yaitu Ibu Esti saat wawancara (27 Maret 2013):

> Hambatannya dalam mengajar anak-anak yaitu durasi pertemuannya kurang karena hanya dua jam pelajaran perminggu, nanti dalam menyampaikan materi di kelas tidak tuntas. Serta dalam menyampaikan materi IPA juga dijadikan satu, tidak dipisah-pisah fisika biologi.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Ibu Legini, yang mengungkapkan pendapatnya dalam wawancara (09 April 2013):

> Mereka itu anak khusus jadi juga harus diperlakukan khusus sehingga kita tahu jalan pikirannya. Kurangnya motivasi oleh orang lain dan dirinya sendiri menjadikan mereka seperti itu, disini dalam mengajar harus sabar dan harus diselingi motivasi agar mereka mau menerima pelajaran, terkadang itu saja masih banyak yang tidak nurut.

Sementara itu hambatan yang menyangkut anggaran dijelaskan oleh Ibu Umi selaku pengelolah PKBM "Tunas Mekar" saat wawancara (28 Maret 2013):

> Hambatannya kalau tidak dapat dana itu masalahnya, anak-anak PKBM itukan anak-anak Lapas maka tidak ada uang pendaftaran sehingga tidak dapat pemasukan tambahan. Untuk anak-anak itu tidak dipungut biaya sama sekali, walaupun seperti itu mereka tetap harus sekolah, walaupun tidak ada dana dari pemerintah.

Bapak Bambang melihat hambatannya berasal dari anak-anak dan anggaran, seperti pendapatnya dalam waktu wawancara (01 April 2013):

> Hambatan karena anaknya malas malas dan kekurangan motivasi diri, oleh karena itu harus di beri motivasi lebih. Kegiatan belajar tidak 100% berjalan mulus. Serta dana untuk pelaksanaan pendidikan masih kurang, karena banyak kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan pendidian seperti bayar tutor, seragam, buku dll.

Semantara itu untuk kegiatan keterampilan juga ada kendalanya, hal itu seperti diungkapkan Bapak Samiaji dalam wawancara (01 April 2013):

> Hambatan di lapangan untuk kegiatan ini karena jumlah petugas dari Lapasnya kurang untuk mengelolah kegiatan ini. Banyaknya kegiatan tidak sebanding dengan jumlah pegawainya. Nanti jika ada yang turun jaga malam mereka membantu membimbing atau mengawasi kegiatan keterampilan di sini.

Anak-anak Lapas juga memilik pendapat berbeda mengenai pembelajaran di dalam Lapas pada saat wawancara (09 April 2013), sebagai berikut:

> Hambatan untuk kesetaraan, susah dalam menyerap pelajaran yang disampaikan tutor lalu bukunya tidak dibawa ke dalam sel jadi tidak bisa belajar. Selain itu di luar bisa main-main dan banyak teman-teman, sehingga tidak stres. Hambatannya ikut keterampilan dan kesenian karena diseleksi oleh pengajar, sehingga tidak bisa ikut kalau tidak memenuhi kriteria. Selain itu karena rasa malas untuk mengikuti kegiatan yang disediakan.

Banyak upaya yang dilakukan oleh Lapas dan PKBM "Tunas Mekar" untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pendidikan nonformal di lapangan. Hambatan mengenai dana yang kurang untuk kebutuhan pendidikan nonformal, seringkali pihak Lapas meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberi dana tiap tahunnya dengan memberi proposal. Upaya tersebut dipilih karena ketakutan Lapas tidak mendapatkan dana dan akan berpengaruh pada operasional. Seperti hasil temuan peneliti bahwa dana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak setiap tahun turun. Seperti penuturan Ibu Sri Lestari dalam wawancara (01 April 2013):

> Saya selalu meminta Ibu Gita untuk memberikan dana pendidikan ke Lapas, entah itu berapa jumlahnya. Karena disini juga tidak ada pemasukan tambahan yang dapat membantu untuk operasional, seperti pendaftaran siswa baru disini tidak ada. Untuk mengajukan dana ya menggunakan proposal.

Masalah SDM yang kurang, ini memang menjadi hambatan namun tidak mengganggu pelaksanaan. Karena Lapas selalu memerintahkan pegawainya untuk membantu pelaksanaan. Seperti memerintahkan dua pegawainya untuk menjadi pengajar kejar paket dan memerintahkan

pegawainya yang turun piket untuk membantu mengawasi dan membimbing kegiatan keterampilan dan kesenian.

Untuk mengatasi masalah tersebut Lapas mengantisipasinya dengan menyudahi kegitan dan beralih kegiatan sebelumnya. Seperti pernyataan Bapak Samiaji dalam wawancara (01 April 2013) sebagai berikut;

> Kalau kegiatan keterampilan yang dilakukan pagi hari nanti jika jam kejar paket sudah mulai ya kegiatan keterampilannya disudahi, dan diterukan besok. Supaya mereka juga biasa mengikuti kejar paket. Intinya disini tidak mengejar hasil tetapi memberi pengetahuan saja agar mereka mempunyai bekal keterampilan.

Langkah tersebut dilakukan supaya nantinya para narapidana juga memiliki bekal lain selain kejar paket. Dalam kegiatan keterampilan dan kesenian tidak mengejar hasil maka jika ada kegiatan dan kejar paket akan dimulai maka kegiatan tersebut disudahi dan berganti kejar paket yang menjadi andalan pendidikan nonformal di Lapas ini.

Selain itu hambatan juga dirasakan oleh para pengajar kejar paket, dimana dengan waktu yang singkat mereka harus menyampaikan materi yang banyak. Namun, para pengajar tidak memaksakan untuk selesai karena terkadang keadaan siswa kurang mendukung juga. Seperti yang dikemukakan Ibu Esti dalam wawancara (27 Maret 2013) :

> Kalau mengajar itu waktunya singkat, namun karena materi kejar paket itu lebih singkat jadi tidak terlalu berbelit-belit seperti di pendidikan formal maka di usahakan untuk sebisa mungkin selesai pada waktu yang telah ditetapkan. Walaupun terkadang tidak bisa karena anak-anak disini mudah bosan, maka jalan satu-satunya membuat kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dan santai.

Kurangnya motivasi diri dari anak-anak Lapas juga menyebabkan kegiatan pendidikan nonformal berjalan kurang efektif. Walaupun ada yang

antusias namun banyak juga yang masih malas-malasan. Sehingga Lapas selalu rutin untuk mengadakan kegiatan pengajian. Serta ada wali narapidana yang akan memantau perkembangan kepribadian mereka secara kontinyu. Wali narapidana adalah para pegawai Lapas. Untuk masalah pengajian Lapas bekerja sama dengan Departemen Agama yang mengadakan pengajian rutin setiap Rabu, dan kebaktian untuk yang Nasrani. Dalam kegiatan tersebut menekankan pada motivasi diri agar lebih baik lagi. Selain Departemen Agama, Lapas juga kerjasama dengan salah satu kelompok Islam untuk memberikan ceramah pada hari selasa.

Harapan kepada lulusan Lapas Anak ini sangat tinggi, terutama dari dari para pengajar dan pegawai Lapas. Karena mereka semua sudah berupaya keras untuk memberikan pelayanan dan bekal untuk narapidana secara maksimal. Mulai dari kegiatan belajar, keterampilan dan kesenian. Dengan tujuan agar mereka mempunyai ijazah dan mampu setara dengan pendidikan formal yang ada di sekolah umum. Bekal keterampilan dan kesenian yang diberikan pihak Lapas kepada mereka agar mereka mempunyai ilmu lain yang bisa menjadi bekal setelah mereka keluar nantinya.

Namun, harapan itu juga tergantung dari orang tua dan narapidanya sendiri untuk menentukan jalannya. Karena Lapas dan PKBM “Tunas Mekar” tidak memiliki kewenangan untuk mereka setelah keluar dari Lapas Anak. Namun, tidak sedikit juga yang mampu meneruskan jenjang

pendidikan yang lebih tinggi lagi dan mampu tertampung di lapangan kerja. Hal ini sesuai wawancara (28 Maret 2013) dengan Ibu Umilatsih:

> Kalau keluar itu tergantung ada yang berusaha ingin melanjutkan ke sekolah formal untuk melanjutkan pendidikannya ada yang melanjutkan di sekolah formal, itu yang selama ini kami tahu dan bisa kami hubungi. Namun ada yang tidak melanjutkan sama sekali, karena berbagai faktor bisa tergantung orangnya dan anaknnya juga.

Seperti penuturan Ibu Esti (27 Maret 2013) sekalu pengajar yang membenarkan pernyataan Ibu Umi:

> Kalo keluar ada yang langsung masuk ke sekolah umum di luar baik negeri maupun swasta, tapi kebanyakan swasta. Seperti paket A ke SMP, paket B ke SMA, atau paket C yang masuk SMA. Kalo udah lulus juga banyak yang kerja. Bahkan ada lulusan sini yang kuliah di salah satu univeritas.

Dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan juga hampir sama dengan pelaksanaan pendidikan di pendidikan formal yang ada di sekolah-sekolah umum. Di PKBM "Tunas Mekar" juga diadakan ulangan harian, ulangan umum semester dan Ujian Nasional (UN). Jika ulangan harian dilakukan oleh masing-masing pengajar dengan berbeda caranya. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Esti yang menyebutkan "Ulangan harian ada namun tidak sering, karena setiap pertemuan tidak tentu sama jumlahnya. Ulangan dalam bentuk lisan".

Berbeda dengan ulangan umum semester yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penyataan ini diperkuat dengan pendapat dari Ibu Gita pada wawancara (16 April 2013):

> Untuk ulangan umum semester soal disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, PKBM terlebih dulu harus memesannya agar diketahui berapa jumlah pesertanya yang mengikuti ulangan umum semester. Baik

untuk Ulangan semester maupun Ujian Nasional (UN) harus dipesan terlebih dahulu, untuk soal Ujian Nasional (UN) dibuat oleh provinsi.

Demikian hasil penelitian mengenai implementasi program pendidikan nonformal untuk narapidana di Lapas Anak Kelas II A Kutoarjo yang ditemukan oleh peneliti melalui wawancara maupun observasi yang dilakukan di dalam Lapas, PKBM, Dinas pendidikan dan kebudayaan serta Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Sosial Kab. Purworejo.

B. Pembahasan

Kebijakan publik yang sudah diimplementasikan dapat dinilai berhasil apabila tujuan dari kebijakan tersebut sudah tercapai dan tertuju pada titik sasaran yang sesuai dengan tujuan awalnya. Implemantasi program pendidikan nonformal di Lapas, bisa berjalan dengan cukup baik karena faktor-faktor keberhasilan implementasi saling berkaitan satu sama lain. Selain karena hal tersebut, karakteristik kelompok sasaran juga mempengaruhi lama tidaknya implemetasi bisa diterapkan. Di dalam Lapas Anak Kutoarjo memiliki karakteristik narapidana yang bermacam-macam, karakteristik tersebut dapat dilihat dari latar belakang narapidana. Narapidana juga bisa dibedakan berdasarkan golongannya yaitu: BI : pidana di atas 1 tahun, B IIa: pidana di bawah 1 tahun, B IIb: pidana di bawah 3 bulan, BIII: pidana pengganti denda, Anak Negara: anak yang dipidana hakim untuk dibina hingga 18 tahun, sedangkan tahanan: anak yang dianggap bersalah oleh penyidik namun menggunakan asas praduga tak bersalah.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi pendidikan nonformal untuk narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo adalah teori George C Edwards III yang berpendapat bahwa faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berdiri sendiri namun juga saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program pendidikan nonformal di lapangan yang mencakup transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dalam implementasi kebijakan, komunikasi menjadi salah satu penentu keberhasilan dari kebijakan yang diterapkan, karena komunikasi membantu pelaksanaan kebijakan di lapangan menjadi lebih mudah. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diketahui oleh pelaksana kebijakan, caranya dengan komunikasi yang dilakukan implementor kepada target atau kelompok sasaran. Jika target atau kelompok sasaran tidak mengetahui tentang kebijakannya maka komunikasi yang dilakukan kurang berhasil atau sebaliknya.

Dalam implementasi program pendidikan nonformal di Lapas Anak Kelas II A Kutoarjo, narapidana adalah kelompok sasarannya. Komunikasi yang dilakukan dapat berupa komunikasi intern dan komunikasi ekstern. Dalam komunikasi intern Lapas dan PKBM memberikan informasi kepada kelompok sasaran mengenai pembelajaran yang berlaku di dalam Lapas ini. Berhubung PKBM berada di dalam

lingkungan Lapas maka anak Lapas secara otomatis menjadi siswa PKBM. Komunikasi seperti itu diberikan kepada kelompok sasaran ketika menjadi penghuni baru, tujuannya agar mereka paham dan mengerti. Serta nantinya mereka mengetahui cara pembelajaran dan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di dalam Lapas. Alur komunikasi tersebut tergambar sebagai berikut:

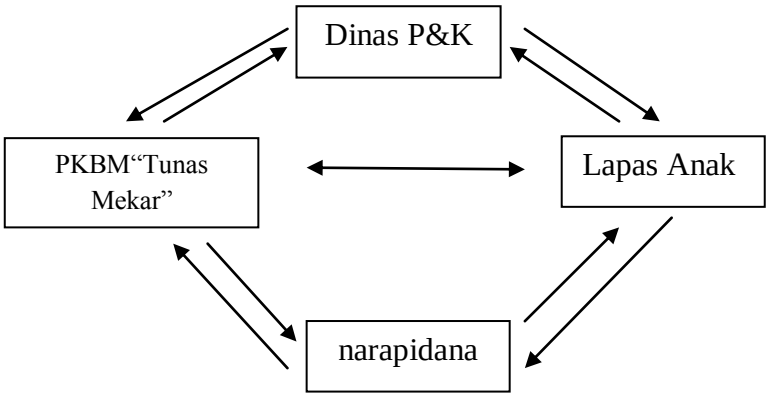

Gambar 3. Alur komunikasi dalam implementasi pendidikan nonformal di Lapas Anak

Untuk komunikasi eksternal, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sosialisasi mengenai anggaran pendidikan, mekanisme ujian semester dan ujian nasional kepada PKBM, lalu PKBM menjelaskan kepada anak-anak Lapas yang menjadi murid PKBM. Bentuk komunikasi biasanya melalui rapat antar instansi hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Sri Lestari:

> Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Purworejo memberi informasi ketika akan ada ujian baik semesteran maupun ujian nasional kepada PKBM "Tunas Mekar". Selain itu ada rapat baik

rapat mengenai persiapan ujian, juga rapat mengenai angggran pendidikan yang akan diterima.

Komunikasi internal dan eksternal dapat membantu penyampaian informasi mengenai pelaksanaan program pendidikan nonformal kepada kelompok sasran secara menyeluruh. Komunikasi terjalin dengan baik karena antara pihak Lapas selalu berupaya mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo. Informasi yang sesuai ini nantinya akan di informasikan kepada narapidana peserta pendidikan nonformal. Informasi-informasi yang dimaksud seperti informasi mengenai persiapan UN, informasi mengenai kurikulum baru, dll

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor utama penentu keberhasilan implementasi kebijakan, karena sumber daya mempunyai peranan sebagai pelaksana kebijakan publik. Jika komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik tetapi tanpa ada sumber daya maka kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan apalagi ditujukan kepada target atau sasaran.

Menurut teori George C. Edwards III (dalam Subarsono 2011:91) menyebutkan bahwa sumber daya dibedakan menjadi dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen saja, tujuannya tidak akan terlaksana di target atau sasaran kebijakan.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam implementasi program pendidikan nonformal di Lapas anak Kutoarjo, sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di lapangan berasal dari dua organisasi yang berbeda, yaitu Lembaga Pemasyarakatan dan PKBM "Tunas Mekar".

1) Sumber Daya Manusia dari Lapas

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo memiliki pegawai yang berjumlah 55 orang (per 1 April 2013). Namun, tidak semua pegawai terlibat langsung dalam pelaksanaan pendidikan nonformal. Karena dari semua pegawai itu dibagi ke dalam beberapa bagian yang mempunyai peran masing-masing. Bagian yang mengurusi pendidikan nonformal di Lapas dikelola oleh bagian bimbingan narapidana dan anak didik dan yang satunya bagian kegiatan kerja. Masing-masing berkaitan dalam masalah bimbingan belajar dan keterampilan yang merupakan bagian dari pendidikan nonformal. Campur tangan Lapas terhadap pendidikan dikarenakan Lapas ingin memenuhi hak anak-anak yang menjadi narapidana agar kebutuhannya dalam pendidikan tetap terpenuhi.

Dalam pelaksanaan bimbingan belajar, 2 pegawai Lapas anak menjadi pengajar untuk kejar paket. Pemilihan kedua pengajar dari Lapas dikarenakan mereka juga memiliki latar belakang pendidikan yang berkompeten dan keterbatasan dana dari PKBM untuk manambah pengajar kurang maka mengambil dari Lapas. Latar belakang kedua pegawai Lapas yang menjadi pengajar di kejar

paket juga cukup baik, Bapak Oscar merupakan sarjana dan Ibu Legini merupakan alumni SPG (Sekolah Pendidikan Guru).

Sementara itu untuk kegiatan kesenian dan keterampilan pengajar atau pembimbingnya kebanyakan dari pegawai Lapas, hanya kegiatan musik yang mengambil pengajar dari luar dikarenakan tidak ada pegawai Lapas yang mampu mengajar musik. Sementara untuk mengajar karawitan, mantan pegawai Lapas yang sudah pensiun tetap mengabdikan diri sebagai pengajar. Oleh karena itu kedua kegiatan tersebut dipisahkan harinya pada hari jumat dan sabtu.

Untuk kegiatan keterampilan lain seperti menjahit, membuat sandal, berkebun, pertanian, perikanan dan peternakan berlaku setiap hari karena pengajarnya merupakan pegawai Lapas yang setiap hari ada ditempat dan tidak memerlukan hari khusus. Jadi sumber daya manusia dari Lapas untuk kegiatan keterampilan dan kesenian masih terbatas, walaupun dalam pelaksanaan tidak menemui kendala yang berarti. Keterbatasan ini mencakup sumber daya manusia untuk mengawasi kegiatan.

2) Sumber Daya Manusia dari PKBM “Tunas Mekar”

Sumber daya manusia dari PKBM “Tunas Mekar”, adalah para pengajar bimbingan belajar. Total pengajar bimbingan belajar ada 9 namun yang dikelola PKBM ini ada 7 orang, karena 2 dari Lapas.

Tabel 11. Daftar pengajar bimbingan belajar

Nama	Mengajar
Ajeng CD	Bahas Inggris (B,C) Bahasa Indonesia (A)
Sri Pangesti S.Pd	IPA (A,B), Fisika Kimia (C)
Dedy P.S S.Pd	Bahasa Indonesia (B,C)
Umilatsih S.Pd	PKN (A), IPS (B)
Lina	Geografi, Sejarah(C)
Turyati	Sosiologi (C)
Mulyono SH	Basa Jawa (A,B,C)

Sumber: PKBM "Tunas Mekar"

Dalam perekrutan semua pengajar tersebut, PKBM "Tunas Mekar" bekerja sama dengan Lapas untuk mencari tenaga pengajar untuk memenuhi kebutuhan di bimbingan belajar PKBM "Tunas Mekar". Dalam penentuan kebutuhan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Purworejo tidak turun tangan, karena itu sudah menjadi ketentuan PKBM sendiri. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat dari Ibu Gita "pengajar ditentukan oleh PKBM bukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, PKBM satuan pendidikan nonformal jadi yang menyediakan pengajar sendiri".

Namun, dalam pelaksaanaannya dibantu oleh Lapas dan PKBM "Sawunggalih" dari di luar lapas. Terkadang pengajar di PKBM lain memiliki jam kosong dan bisa mengajar di lapas maka bisa diterima menjadi pengajar di PKBM "Tunas Mekar".

Penentuan kebutuhan pengajar juga ditentukan oleh anggaran yang dimiliki oleh PKBM dan Lapasnya. Sebab dana tersebut juga penting untuk pembayaran gaji pengajar di PKBM “Tunas Mekar”.

Dalam kenyataan di lapangan jumlah pengajar untuk kegiatan belajar mengajar jumlahnya sudah mampu mengatasi narapidana yang berjumlah 5 kelas. Jumlah pengajarnya hanya 9 orang walaupun tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pelaksanaannya. Apalagi salah satu pengajar bisa mengampu lebih dari satu mata pelajaran. Sumber daya manusia untuk pengajar bimbingan belajar sangat bergantung pada sumber dana yang tersedia, karena mereka dibayar dari dana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo. Dana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purwoejo masih kurang mencukupi maka untuk belanja pengajar harus diminimalisir yang penting untuk setiap mata pelajaran ada pengajarnya.

Sebagai pengajar di Lapas tidak cukup pintar saja, namun harus sabar dan mempunyai mental baja. Di dalam pembelajaran nantinya akan ditemui pertanyaan dari narapidana yang kurang sesuai, kalau tidak sabar dan bermental baja nanti akan kesulitan. Kejadian tersebut akan selalu mengintai para pengajar, mengigat mereka mengajar para narapidana yang memiliki karakteristik khusus apabila dibandingkkan dengan siswa di sekolah umum ataupun PKBM lain. Karakeristik tersebut dapat dilihat dari latar

belakang kasus mereka, dan kebanyakan mereka sangat hiperaktif sehingga pengajar harus bisa tegas dan sabar untuk menenangkan suasana agar pembelajaran bisa berjalan kondusif.

b. Sumber Daya Finansial

Implementasi Kebijakan publik tidak akan terwujud dengan baik jika tidak ada dana, karena dana sangat dibutuhkan untuk operasional. Dana yang disediakan juga bisa dijadikan sebagai alat peningkatan kualitas, karena dengan dana yang ada mampu memperbaiki peralatan, perlengkapan, kualitas manusia jadi lebih baik lagi. Dalam implementasi program pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo, dana berasal dari 2 sumber,yaitu:

1) Lembaga Pamasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo yang memiliki program keterampilan dan kesenian serta di dalam lingkungan lapas berdiri PKBM. Dana operasional bulanan Lapas yang berasal dari Kemenkumham, sebagaian dana tersebut dialokasikan untuk pendidikan. Jumlah dana yang dikeluarkan dari dana operasional bulanan sudah terpotong untuk dana konsumsi yang jumlahnya cukup besar dan dana kesehatan untuk narapidana serta dana perawatan Lapas.

Sisa dana tersebut diberikan untuk anggaran pendidikan. Kebanyakan dana yang dikeluarkan dari Lapas untuk kegiatan kesenian dan keterampilan, namun juga ada untuk kegiatan

bimbingan belajar. Kegiatan keterampilan dan kesenian tidak banyak mendatangkan pengajar dari luar sehingga pengeluaran tidak terlalu besar untuk gaji pengajar. Alokasi anggaran lebih ditekankan pada pembelian bahan baku, bibit tanaman dan peralatan keterampilan dan kesenian.

2) Pemerintah (melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

Dana pendidikan nonformal yang berasal dari pemerintah pusat, diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan kuota anggaran tertentu. Selanjutnya dalam pembagian anggaran ditentukan oleh Dinas P & K dengan membagi rata ke setiap PKBM. Dengan dana yang kecil dari pemerintah pusat, mengakibatkan dana tidak setiap tahun didapat oleh masing-masing paket kesetaraan.

Untuk PKBM “Tunas Mekar” sejak berdiri tahun 2010 sudah menerima dana sebanyak 2 kali yang mencakup: pertama pada tahun 2010 yang berjumlah 45 juta dan diperuntukan untuk paket B, kedua pada tahun 2012 sebesar 12,5 juta diperuntukan untuk kejar paket A. Dana dari pemerintah pusat tersebut diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan yang mencakup alat pembelajaran, bahan pembelajaran dan pengajarnya sendiri.

Dengan dana yang setiap tahun tidak tentu keluar, maka PKBM dalam mengelola anggaran untuk satu tahun ke depan dibagi rata. Hal tersebut disebabkan saling membutuhkan. Seperti contoh

dalam tahun 2012 Paket A dapat dana, seharusnya alat dan bahan pembelajaran paket A terpenuhi namun paket B dan C dipenuhi juga. Dananya berasal dari dana Paket A, untuk gaji pengajar juga demikian.

Perbedaan PKBM yang ada di dalam Lapas dengan yang ada di luar itu tidak adanya uang pendaftaran peserta pembelajaran. Karena narapidana yang menjadi tahanan Lapas otomatis menjadi murid di PKBM "Tunas Mekar". Berbeda dengan PKBM yang di luar yang memperoleh uang pendaftaran, sehingga ada pemasukan tambahan. Dana yang berasal dari Pemerintah dan Lapas, masih kurang untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal, karena masih banyak kekurangan untuk pemenuhan pengeluaran dalam pelaksanaan pendidikan nonformal. Semua jenis kegiatan yang di adakan oleh Lapas dan PKBM "Tunas Mekar" tidak dipunggut biaya/ gratis.

3. Disposisi

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III (dalam Agustino, 2006:153-154) menyangkut diposisi implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Pengangkatan Pegawai

Dalam implementasi pendidikan nonformal di Lembaga Pemasyrakatan Anak Kelas II A Kutoarjo pegawainya diperoleh dari Lapas dan PKBM. Untuk pegawai yang berasal dari Lapas di angkat melalui tes CPNS yang dikelola oleh Kemenkumham yang berpusat

di Jakarta. Karena pegawai Lapas berasal dari Kemenkumham melalui SK penempatan, Lapas tidak bisa mengangkat pegawai melalui pendaftaran di Lapas langsung.

Berbeda dengan Lapas, untuk pengangkatan pengajar PKBM di dalam Lapas pengangkatan dilakukan oleh PKBM sendiri dibantu dari Lapas. Dalam pengangkatan pegawai ini, PKBM menyeleksi calon pengajar dan membayarkan honor untuk pengajar. Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo hanya mengarahkan, memantau, mengevaluasi dan menyalurkan dana pendidikan. Seperti keterangan Ibu Gita dalam wawancara "Pengajar ditentukan oleh PKBM bukan Dinas, PKBM satuan pendidikan nonformal, jadi yang menyediakan pengajarnya sendiri".

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terkendalanya pendidikan nonformal yang baik berasal dari anggaran yang minim, karena untuk digunakan untuk membayar pengajar. Jika pengajar di*supply* dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan langsung maka pengajar tidak perlu mengambil dana dari Dinas Pendidikan &Kebudayaan untuk honor mereka. Selain gaji yang minim para pengajar dihadapkan pada karakteristik para narapidananya yang berbeda-beda. Untuk menghadapi narapida yang berbeda karakteristik juga tidak mudah, karena mereka harus ekstra sabar dan diperlukan inovasi pembelajaran.

b. Insentif

Untuk anggaran pendidikan nonformal yang tidak setiap tahun dapat dana operasionalnya, maka untuk insentif yang dikeluarkan untuk pegawai dan pengajar kegiatan pendidikan nonformal tidak ada. Dalam mendapatkan dana untuk operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Lapas kebanyakan untuk keperluan pembelian alat dan bahan pendidikan yang masih dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran, maka sisanya sedikit hanya untuk membayar gaji pegawai tanpa ada insentif tambahan.

Seperti pendapat Ibu Umi yang terjadi waktu wawancara "dana untuk pelaksanaan pendidikan masih kurang, karena banyak kebutuhan beli alat dan bahan, untuk pengajar ada uang untuk transport". Dari pernyataan narasumber di atas, bahwa insentif yang diberikan tidak ada sehingga para pengajar kurang terjamin dari segi finasialnya, ini bisa berdampak pada kinerja mereka. Berbeda dengan pegawai Lapas yang ada remunerasi yang mampu menyuntikkan semangat untuk bekerja lebih giat lagi.

Walaupun tidak mendapat remunerasi seperti Lapas, pengajar PKBM "Tunas Mekar" selalu berupaya mendidik narapidana dengan baik di Lapas Anak Kutoarjo. Banyaknya kekurangan tidak membuat para pengajar patah semangat, padahal anak-anak yang mereka hadapi memiliki karakteristik yang bervariasi. Karakteristik anak-

anak bisa dilihat dari latar belakang kasus mereka, mulai dari kasus pencabulan, perampokan, penganiayaan, pencurian dll.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Di Lapas mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit pelaksanaan kegiatan yang ada di Lapas Anak Kutoarjo. Struktur organisasi Lapas seperti pada gambar berikut:

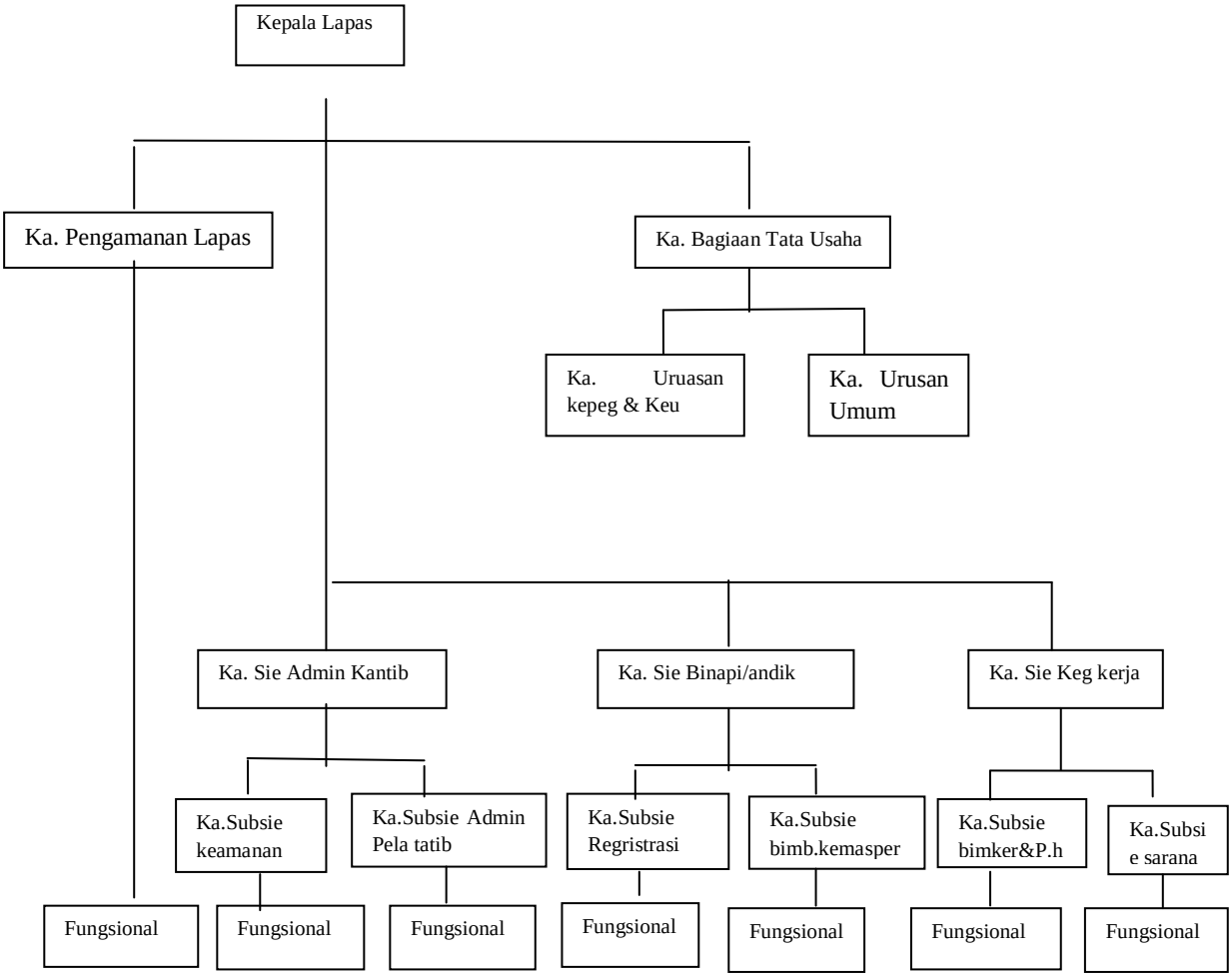

Gambar 4. Struktur Organisasi Lapas Anak Kelas IIA Kutoarjo

Sumber: Lapas Anak Kutoarjo

Dari susunan organisasi Lapas, dapat diketahui bahwa bagian bimbingan napi dan anak didik serta bagian kerja sebagai bagian yang menangani pendidikan nonformal untuk narapidana di Lapas Anak, dalam hal ini bagian bagian tersebut dibantu oleh sub seksi yang mempunyai tugas lebih terperinci. Sub seksi bimbingan kemasyarakatan mempunyai inovasi untuk mengembangan pendidikan nonformal lebih

baik lagi, dengan membentuk PKBM “Tunas Mekar”. Meskipun pembentukan PKBM “Tunas Mekar” dibentuk berdasarkan persetujuan jajaran Lapas Anak, namun bagian sub seksi bimbingan kemasyarakatan yang mengatur keberadaan PKBM “Tunas Mekar”, Sehingga untuk kepengurusan PKBM terdapat Ka Sub seksi Bimbingan kemasyarakayan menjabat sebagai sekertaris. Meskipun begitu, pemerintah pusat (Depdiknas) belum memperhatikan pendidikan nonformal di Lapas, terbukti dengan adanya PKBM “Tunas Mekar” yang dibentuk oleh inisiatif Lapas bukan dibentuk pemerintah untuk kebutuhan narapidana.

Seandainya pemerintah pusat memikirkan kebutuhan pendidikan untuk anak Lapas, maka akan mempermudah pelaksanaan pendidikan nonformal di Lapas. Struktur birokrasi juga menghambat implementasi program pendidikan nonformal di Lapas, selama ini struktur PKBM “Tunas Mekar” tidak jadi satu dengan struktur organisasi Lapas. Dalam pembentukan PKBM “Tunas Mekar” Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai peranan penting. Selain menjadi pengarah dan pengawas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menempatkan pegawainya sebagai pelindung, pembina dan penanggung jawab dalam kepengurusan PKBM “Tunas Mekar”.

Tabel 12. Susunan kepengurusan PKBM “Tunas Mekar”

No.	Nama	Jabatan dalam pengurusan	Jabatan dalam Dinas
1	Drs. Bambang Aryawan, MM	Pelindung	Ka. Dinas P&K Kab
2	Drs. Tri Hermanto, MM	Pembina	Ka. UPT P&K kutoarjo
3	Uji Priyantono, S.Pd	Penangungjawab	Penelik PLS Dikmas-Paud
4	Umilatsih, S.Pd	Ketua	
5	Bambang Trisno S	Sekertaris	
6	Dra. Suminah	Bendahara	

Sumber : PKBM “Tunas Mekar”

Mengacu pada pendapat Edward III (dalam Agustino, 2006:153) yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah melakukan *Standar Operating Procedures* (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melakukan aktifitas pekerjaannya dengan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan pegawai sehari-hari diantara beberapa unit kerja.

a. SOPs

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo dalam pelaksanaan program pendidikan nonformal sudah menggunakan SOPs. Lapas yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI sudah melakukan remunerasi sehingga kerja pegawai Lapas sudah berdasarkan standar prosedur. Kinerja pegawai Lapas dilihat dari aktifitas yang dilakukan berdasarkan standar prosedur tersebut.

Untuk PKBM sendiri ada SOPs untuk melaksanakan program pendidikan nonformal kejar paket, standarnya pada kurikulum pembelajaran yang menjadi acuan. Kurikulum hanya mematok standar materi pembelajaran, standar kegiatan kerjanya ada yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain kurikulum, SOPsnya mencakup tenaga pengajar, mata pelajaran yang diajarkan, dan kalender akademik. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala yang berarti dalam pembelajaran, sehingga pelaksanaan kejar paket dapat berjalan dengan baik.

SPM (Standar Pelayanan Minimum) di Lapas maupun PKBM "Tunas Mekar" belum ada. Namun, secara keseluruhan dalam pelaksanaan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bersama selalu memberikan kualitas yang baik dengan patokan dari luar seperti kualitas yang baik. Selain itu, dalam pelaksanaannya mempunyai target tertentu untuk mengukur keberhasilan seperti lulus 100%, menciptakan lulusan yang mempunyai *skill* yang baik dalam bidang keterampilan maupun kesenian.

b. Fragmentasi

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo dipimpin oleh seorang Kepala Lapas yang berada dibawah tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berada di Semarang. Struktur birokrasi dari Lapas terlihat jelas pemisahan kegiatan kerja antara satu dengan yang lain dan hubungannya

dibatasi. Kepala Lapas sebagai pejabat tertinggi, dimana mempunyai tugas mengelola dan mengatur kegiatan kerja bawahannya.

Pelaksanaan kebijakan secara teknis operasional/kegiatan teknis penunjang diserahkan kepada lima kepala bagian yang mengkoordinasikan pegawai Lapas yang lain dalam melaksanakan tugas, kepala bagian itu antara lain Kepala Pengamanan Lapas yang membawahi petugas yang melakukan pengaman Lapas dan memeriksa tamu yang berkunjung, Kepala Tata Usaha yang mengelola kegiatan pengolahan kepegawaian Lapas dan urusan umum, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban yang mengelola kegiatan keaman di dalam Lapas dan ketertiban, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik yang mengelolah registrasi anak didik dan bimbingan anak didik, dan Kepala Seksi Kegiatan Kerja yang mengelola bimbingan kerja yang di Lapas dan mengelola sarana kerja.

Selain keempat faktor penentu keberhasilan menurut Edward tadi dalam pelaksanaan pendidikan di Lapas Anak Kelas II A Kutoarjo terdapat juga faktor penghambat, yang menjadi penghambat pelaksanaan pendidikan nonformal tersebut berasal dari beberapa faktor, antara lain:

1. Minimnya Dana Operasional

Kegiatan pendidikan nonformal yang dilakukan di Lapas Anak Kelas II A Kutoarjo semuanya terselenggara secara gratis. Meskipun gratis

bukan berarti dana yang tersedia untuk kegiatan pendidikan nonformal itu melimpah. Jumlah dana operasionalnya tidak pasti tiap tahun ajaran. Padahal kebutuhan untuk belanja alat, bahan dan pengajar itu pasti ada dan selalu meningkat.

Jumlah dana yang tidak pasti untuk tiap tahunnya, membuat pelaksanaan kegiatan pendidikan nonformal di Lapas sedikit terkendala operasionalnya. Untuk menjalankan pendidikan nonformal di Lapas Anak Kelas II A Kutoarjo berasal dari 2 sumber, yang pertama berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo yang kedua berasal dari Lapas.

Kebutuhan dana operasioal pendidikan nonformal untuk membeli buku paket, membeli alat tulis, membeli seragam, membeli bahan untuk keterampilan dan kesenian, membayar pengajar dan pelatih dll. Dana tersebut sebagian besar dipakai untuk membeli alat dan bahan pendidikan sehingga anggaran untuk membayar pengajar sangat minim.

Untuk mengatasi permasalahan dana, pihak Lapas selalu mengupayakan untuk mendapatkan dana dari pemerintah dengan mengajukan proposal. Lapas dan PKBM “Tunas Mekar” meminimalisir belanja pengajar karena itu akan menambah pengeluaran. Salah satu upayanya yaitu adanya pegawai Lapas yang menjadi pengajar untuk kejar paket.

2. Waktu Kegiatan yang Terbatas

Bermacam-macam kegiatan pendidikan nonformal yang disediakan di Lapas Anak Kelas II A Kutoarjo hanya berlangsung dari pagi sampai siang dan hanya berlangsung pada hari senin sampai sabtu (untuk kegiatan keterampilan), sedangkan kegiatan kesenian berlangsung pada hari jumat dan sabtu. Untuk kegiatan kejar paket berlangsung dari hari senin sampai jumat pada pukul 09.00-11.00. Untuk kejar paket yang hanya berlangsung 2 jam perhari, ini masih dirasakan kurang oleh narapidana maupun pengajar.

Sebenarnya jam pelajaran yang hanya 2 jam dilakukan untuk mengantisipasi kebosanan yang dirasakan oleh narapidana, karena mereka memiliki tingkat kebosanan yang tinggi bila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Maka nantinya akan mengganggu konsentrasi belajar dan ilmu yang disampaikan pengajar kurang bisa diterima oleh mereka. Terbatasnya waktu kegiatan, juga berpengaruh kepada peserta kegiatan kesenian maupun keterampilan, sehingga satu narapidana hanyak mengikuti satu kegiatan saja. Bahkan banyak yang tidak mengikuti semua kegiatan kecuali kejar paket.

Banyak faktor yang mendasari salah-satunya karena mereka malas, selain itu adanya seleksi peserta kegiatan keterampilan dan kesenian. Seleksi ini dilakukan untuk memilih peserta yang mempunyai bakat dan kesungguhan. Diharapkan nantinya pelaksanaan tidak terdapat kendala yang berarti. Upaya untuk mengatasi masalah terbatasnya durasi tersebut

antara lain, dengan memperbaiki proses pembelajaran melalui pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Untuk peserta keterampilan akan menyudahi kegiatan jika kejar paket akan dimulai, sehingga siswa tidak dirugikan salah satunya. Untuk kegiatan kesenian tidak ada masalah karena harinya tertentu saja dan pada hari Jumat dan Sabtu di luar kegiatan belajar mengajar di PKBM "Tunas Mekar".

3. Kurangnya Motivasi dari Diri Narapidana

Dengan status sebagai narapidana, peserta pendidikan nonformal di Lapas Anak Kelas II A Kutoarjo sudah mempunyai perilaku buruk sehingga mempengaruhi pola pikirnya, sehingga mereka berperilaku semaunya sendiri tanpa berfikir akibatnya. Terutama untuk kebaikan dirinya saja mereka masih malas apalagi untuk membantu orang lain disekitarnya. Penyebab perilaku mereka seperti itu dikarenakan tidak adanya motivasi dari diri narapidana.

Latar belakang mereka dengan karakteristik yang beragam dan masa lalu mereka yang hidup di dunia negatif menjadikan mereka kurang pencerahan untuk dirinya sendiri. Selain motivasi dari keluarga juga kurang karena disini peran keluarga tidak optimal untuk memberi pengajarahan kepada mereka, sehingga terbawa ke dalam Lapas dan dalam mengikuti kegiatan pendidikan nonformal yang diselenggarakan di Lapas Anak Kelas II A Kutoarjo. Hak tersebut terbukti banyak narapidana yang mengikuti kejar paket masih kurang bersemangat, dan banyak yang sama sekali tidak mengikuti satu kegiatan dengan alasan malas.

Upaya untuk mengatasi krisis motivasi diri narapidananya, Lapas menyediakan acara pengajian yang dilakukan setiap hari Selasa dan Rabu pada pukul 08.00-09.00 WIB (untuk agama Islam) dan hari-hari tertentu (untuk agama Kristen). Untuk hal ini Lapas bekerja sama dengan Departemen Agama Kab. Purworejo dan salah satu organisasi keagamaan (untuk agama Islam) yang ada di Purworejo. Materi utama yang di berikan tentang motivasi hidup dan sebagian materi keagamaan. Selain memotivasi diri dengan pengajian, Lapas menyediakan wali untuk setiap narapidana juga membantu mengatasi moivasi ini, karena para wali aktif memberikan arahan dan bimbingannya. Wali narapidana merupakan pegawai aktif Lapas Anak Kelas II A Kutoarjo.

Meskipun terdapat kendala dalam mengimplementasikan program pendidikan nonformal di Lapas Anak Kutoarjo, namun Lapas selaku penyelenggara pendidikan nonformal bisa melakukan inovasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan mendirikan PKBM “Tunas Mekar” di dalam lingkungan Lapas. Sebelumnya dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal Lapas bekerja sama dengan PKBM “ Sawunggalih”, namun karena aturan Lapas melarang narapidananya keluar lingkungan Lapas menjadikan kerja sama ini mengalami kendala. Baru pada 2010 Lapas membentuk PKBM sendiri guna pemenuhan kebutuhan pendidikan narapidananya.

Awalnya Lapas kesulitan untuk membuat PKBM “Tunas Mekar”, karena dalam aturannya bahwa satu Kecamatan memiliki satu PKBM. Namun disini Kecamatan Kutoarjo akan memiliki dua PKBM, yaitu PKBM “Sawunggalih” dan

PKBM “Tunas Mekar”. Ada pengecualiaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Purworejo, maka mengijikan PKBM “Tunas Mekar” di berikan. Pengecualian tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa narapidana di Lapas Anak harus tetap mendapatkan pelayanan pendidikan. Pada 01 Februari 2011 PKBM “Tunas Mekar” berdiri secara resmi dengan berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo nomor :848/521/2011.

Berdirinya PKBM “Tunas Mekar” di dalam Lapas terbukti efektif untuk mempermudah pembelajaran bagi narapidananya, sehingga narapidana tidak kabur dan bebas berkeliaran di luar lingkungan Lapas. Inovasi dari Lapas ini sangat membantu terwujudnya pendidikan bagi seluruh anak indonesia tak terkecuali anak-anak yang menjadi tahanan di Lapas Anak Kutoarjo.